



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 70);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 70) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 95

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 70
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
DIKLAT TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis BKD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis BKD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, sehingga dalam pelaksanaan program dan

kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Garut yang disingkat PD.

Dokumen Renja BKD akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKD dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai tugas dan fungsinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta

mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendapatkan partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Rencana Kerja BKD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD. Penyusunan Perubahan Renja BKD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi terkini BKD, evaluasi pelaksanaan Renja BKD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap realisasi pencapaian Renja BKD.

BKD membentuk Tim Penyusun Perubahan Renja BKD Tahun 2023, bertugas menyusun Perubahan Renja BKD Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sebelum dilakukan asistensi perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah memberikan pengarahan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Garut terkait mekanisme dan sistematika penyusunan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, Kemudian

ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan perubahan Renja BKD Tahun 2023, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja tahun berjalan BKD. Dalam penyusunan perubahan Renja BKD Tahun 2023, ada beberapa hal yang perlu kan yaitu pengolahan data dan informasi pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan.

Setelah disusun, kemudian dilakukan asistensi perubahan Renja BKD Tahun 2023 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun berkenaan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 sebagai dasar BKD selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai tugas dan fungsi. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja dimaksud merupakan Rancangan akhir Perubahan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyusunan Perubahan

Renja Perangkat Daerah sesuai surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Setelah dilakukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja BKD Tahun 2023 Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut sesuai surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut perihal Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun penyesuaian Pagu Indikatif, Target Program/Kegiatan. Dalam Finalisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, menegaskan bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan proses penyusunan yang mengacu program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana Peraturan Bupati Garut Nomor Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Nomor : 50/4085-BKD/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2023.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan melakukan penyesuaian pagu anggaran, dan nomenklatur pada program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi SIPD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja BKD Tahun 2023 diverifikasi Oleh Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan penyesuaian sebagaimana hasil verifikasi Oleh Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam penyusunan Perubahan Renja BKD Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi 2 yakni urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM, Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Perubahan Renja BKD Tahun 2023 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan BKD Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara periodik melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan Dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan, maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon

Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Perubahan Renja BKD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja BKD merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Garut, yaitu **"Garut yang Bertakwa, Maju dan Sejahtera"**. Menunjang Misi 2 yaitu **"Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih"**. Dengan tema pembangunan tahun 2023 adalah ***"Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut Tahun 2023 berpedoman pada :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Garut tahun 2023; dan
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja BKD sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja merupakan pedoman bagi BKD dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 70);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan/ SKPD ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKD tahun 2023 merupakan suatu dokumen perencanaan satu tahunan yang merupakan penjabaran dari Program dan Kegiatan.

Adapun sistematika penulisan Perubahan Renja berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, sebagai berikut;

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD.

Bab III.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja BKD.
- 3.2 Program dan Kegiatan.

Bab IV.PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja
- 4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja BKD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Garut, Badan Kepegawaian dan Diklat mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD, adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Misi ke-2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, **yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih.**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertakwa, Maju dan Sejahtera**, maka melalui Misi ke-2 ini dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerja sama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Garut Tahun 2019-2024, maka disusun dan dirumuskan serta ditetapkan tujuan dan sasaran BKD, tujuan Rencana Kerja BKD Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Profesionalitas ASN
2. Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian

Sasarannya Rencana Kerja BKD Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah :

1. Penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit
2. Mewujudkan BKD yang berkinerja tinggi dan Akuntabel

Rencana Kerja BKD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis BKD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKD ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKD selama tahun 2023.

Adapun hasil Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja program persentase pemenuhan penunjang urusan BKD.

Program ini terdiri dari 7 kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Renja PD Triwulan II Tahun 2023 sebesar 30%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas 5 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 7 laporan, realisasi capaian kinerja Renja Triwulan II Tahun 2023 sebesar 0 laporan akuntabilitas kinerja BKD (capaian kinerja 0%, terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target kinerja 2 Dokumen, realisasi kinerja 1 Dokumen (capaian kinerja 50%) sedangkan realisasi anggaran 72%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Target kinerja 1 Dokumen, realisasi kinerja 0 Dokumen (capaian kinerja 0%) sedangkan realisasi anggaran sangat rendah 0%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Target kinerja 1 Dokumen, realisasi kinerja 0 Dokumen (capaian kinerja 0%) sedangkan realisasi anggaran 53%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Target kinerja 1 Dokumen, realisasi kinerja 0 Dokumen (capaian kinerja 0%) sedangkan realisasi anggaran sangat rendah 6%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, Target kinerja 1 Dokumen, realisasi kinerja 0 Dokumen (capaian kinerja 0%) sedangkan realisasi anggaran sangat rendah 34%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Target kinerja 1 Dokumen, realisasi kinerja 0 Dokumen (capaian kinerja 0%) sedangkan realisasi anggaran 51%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, bahan evaluasi kinerja dibuatkan setiap bulan melalui laporan monitoring

evaluasi kinerja, laporan triwulan dan evaluasi renja sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja BKD tahun 2023 yang akan dibuatkan secara utuh pada bulan Desember tahun 2023. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sedang 26%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas 2 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renja PD Triwulan II Tahun 2023 sebesar 0 laporan (capaian kerja 0%), terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, faktor tidak tercapainya anggaran terealisasi sesuai target karena terdapat penerimaan gaji dan tunjangan ASN kepada 76 (Tujuh Puluh Enam) orang PNS.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, faktor tidak tercapainya anggaran terealisasi sesuai target karena pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilakukan pada akhir tahun. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sedang 59%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas 1 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renja PD Triwulan II Tahun 2023 sebesar 0 laporan (capaian kerja 0%), terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Target kinerja 1 Dokumen, realisasi kinerja 0 Dokumen (capaian kinerja 0%) sedangkan realisasi

anggaran sangat rendah 0%. Tindak lanjut yang diambil adalah mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan sesuai Renja;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas 6 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 11 jenis, realisasi capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 5 kegiatan, (capaian kinerja 45%), terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Bangunan Kantor, faktor target 12 Paket, realisasi 6 paket capaian kinerja 50% sedangkan realisasi anggaran 15%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, faktor target 1 paket, realisasi 1 paket (capaian kinerja sangat rendah 0%) sedangkan realisasi anggaran tinggi sebesar 77%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target 1 paket, realisasi 1 paket (capaian kinerja tinggi 100%) sedangkan realisasi anggaran 47%. Tindak lanjut diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target 28 Dokumen realisasi 14 dokumen (capaian kinerja sedang 50%) dan realisasi anggaran

sedang 56% Tindak lanjut diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;

- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu, target 1 laporan realisasi 0 laporan (capaian kinerja sangat rendah 0%) sedangkan realisasi anggaran sangat rendah 34%. Tindak lanjut diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target 1 laporan realisasi 0 laporan (capaian kinerja sangat rendah 0%) dan realisasi anggaran sangat tinggi 71 %. Tindak lanjut yang diambil adalah menyesuaikan pagu sub kegiatan dengan kebutuhan dan perubahan target kinerja serta pagu anggaran disesuaikan Kembali pada Saat Perubahan Renja maupun PAK sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 1 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 1 paket, realisasi capaian kinerja Renja PD Triwulan II Tahun 2023 0 paket (capaian kinerja 0%), terdiri dari sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena sub kegiatan direalisasikan pada triwulan III. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0%, sedangkan anggaran sangat rendah 0%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 2 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 3 jenis, realisasi 3 jenis (capaian kinerja Renja PD triwulan II Tahun 2023 sebesar 100%), terdiri dari sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi sesuai target karena anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk pembayaran telepon dan listrik setiap bulan. target 1 laporan, realisasi 0 laporan (capaian kinerja sangat rendah 0%) sedangkan realisasi anggaran sangat rendah 19%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target 2 laporan, realisasi 2 laporan (capaian kinerja sangat tinggi 100%) sedangkan realisasi anggaran 26%, karena pembayaran dilaksanakan secara termin setiap triwulan. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 3 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 17 jenis, realisasi kinerja Renja PD Triwulan II Tahun 2023 sebesar 4 jenis, (capaian kinerja Renja Tahun 2023 sebesar 24%, terdiri dari sub kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target 12 unit realisasi 11 unit (capaian kinerja sangat tinggi 92% sedangkan realisasi anggaran 58%). Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan

monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub kegiatan setiap tribulan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya;

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target 12 unit realisasi 8 unit (capaian kinerja 67%) sedangkan realisasi anggaran sedang 57%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub kegiatan setiap tribulan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya;

2. Realisasi Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja program persentase Pemenuhan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kapasitas ASN.

Program ini terdiri dari 4 kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 86%, realisasi capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 35%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terdiri atas 4 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 3 dokumen, realisasi capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 1 dokumen, dan target capaian kinerja Renja Tahun 2023 sebesar 33%, terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena kegiatan pengadaan PNS dan PPPK akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sangat rendah 16%. Tindak lanjut yang diambil adalah melakukan penyesuaian penetapan pagu sub kegiatan pada perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan;
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi

sesuai target karena sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sedang 68%. Tindak lanjut yang diambil adalah melakukan penyesuaian penetapan pagu sub kegiatan pada perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan;

3) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena kegiatan akan direalisasikan pada triwulan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sangat rendah 5%. Tindak lanjut yang diambil adalah menyesuaikan pagu sub kegiatan dengan kebutuhan dan perubahan target kinerja serta pagu anggaran disesuaikan Kembali pada Saat Perubahan Renja sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

4) Pengelolaan Data Kepegawaian, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena kegiatan akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sangat sangat rendah 6%. Tindak lanjut yang diambil adalah menyesuaikan pagu sub kegiatan dengan kebutuhan dan perubahan target kinerja serta pagu anggaran disesuaikan Kembali pada Saat Perubahan Renja sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

b. Mutasi dan Promosi ASN terdiri atas 3 sub kegiatan, dengan kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 12 dokumen, realisasi capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 8 dokumen, dan capaian kinerja Renja Tahun 2023 sebesar 67%, terdiri dari sub kegiatan:

1) Pengelolaan Mutasi ASN, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target sub kegiatan

direalisasikan sesuai usulan perpindahan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian sedang 50%, sedangkan anggaran sangat rendah 6%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;

2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena kegiatan pemrosesan kenaikan pangkat periode Oktober akan direalisasikan pada triwulan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 33%, sedangkan anggaran sangat rendah 49%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub kegiatan setiap tribulan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya;

3) Pengelolaan Promosi ASN, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena sub kegiatan direalisasikan sesuai kebutuhan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sedang 60%, sedangkan anggaran sangat rendah 27%. Tindak lanjut yang diambil adalah menyesuaikan pagu sub kegiatan dengan kebutuhan dan perubahan target kinerja serta pagu anggaran disesuaikan Kembali pada Saat Perubahan Renja maupun PAK sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

c. Pengembangan Kompetensi ASN terdiri atas 3 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 551 Orang, realisasi capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 dan target capaian kinerja Renja Tahun 2023 sebesar 12%, terdiri dari sub kegiatan:

1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasikan sesuai target karena

kegiatan akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 36% sedangkan anggaran sangat rendah 36%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;

2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasikan sesuai target karena kegiatan akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sangat rendah 4%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;

3) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasikan sesuai target karena kegiatan akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sangat rendah 34%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan penetapan target sehingga terjadi keseimbangan antara capaian dan perencanaan;

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri atas 5 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 5 Kegiatan, realisasi capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 0 Kegiatan, dan target capaian kinerja Renja Tahun 2023 sebesar 0%, terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Capaian kinerja sangat tinggi 100% dan anggaran sangat tinggi 100%.
- 2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja), faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena sub kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Implikasi yang timbul terhadap capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sedang 61%. Tindak lanjut yang diambil adalah menyesuaikan pagu sub kegiatan dengan kebutuhan dan perubahan target kinerja serta pagu anggaran disesuaikan Kembali pada saat Perubahan Renja sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- 3) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena sub kegiatan akan direalisasikan pada triwulan III. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sangat rendah 2%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub kegiatan setiap triwulan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya;
- 4) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena indikator sub kegiatan bukan lagi Jumlah penyelenggaraan siding MP3D. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sedang 50% dan anggaran sedang 50%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub kegiatan setiap triwulan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya dan

penyesuaian target kinerja pada saat perubahan Renja BKD 2023;

- 5) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena sub kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sedang 58% sedangkan anggaran sedang 58%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub kegiatan setiap tribulan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya;

3. Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja program persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS. Program ini memiliki 2 kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 86%, capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 44%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri atas 1 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 2 kebijakan, realisasi capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 0 Kebijakan, dan capaian Renja Tahun 2023 sebesar 0%, terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena kegiatan akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 0% sedangkan anggaran sangat rendah 1%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan sub kegiatan setiap triwulan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya;

- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri atas 1 sub kegiatan, dengan target kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 1 laporan, realisasi capaian kinerja Renja PD Tahun 2023 sebesar 0 laporan, dan capaian kinerja Renja Tahun 2023 sebesar 0%, terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, faktor penyebab anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena kegiatan Pelatihan Dasar masih berlangsung sehingga anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja sangat rendah 33%, sedangkan sangat rendah 47%. Tindak lanjut yang diambil adalah lebih mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian pelaporan sub kegiatan setiap triwulan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya.

Dari 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan BKD Pada Tahun 2023, ada 10 (sepuluh) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (0%);
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (0%);
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (0%)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (45%);
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (0%);
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (24%)

7. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (0%);
8. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (0%);
9. Pengembangan Kompetensi Teknis (0%);
10. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (0%);

2.1.1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, hasil /keluaran yang direncanakan;

Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan BKD Pada Tahun 2023 TW II, ada 26 (Dua puluh enam) sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan realisasi capaian kinerjanya kurang dari 50%. Adapun sub kegiatannya terdapat pada tabel di bawah ini :

N o.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Rp.
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Doku men	1.011.185.200	- Doku men	24.469.500	1 Doku men	132.827.200	1 Doku men	33%	157.296.700
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Doku men	159.953.300	- Doku men	30.104.400	- Doku men	79.205.500	- Doku men	0%	109.309.900
3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi yang difasilitasi	- Lembaga	-	- Lembaga	-	- Lembaga	-	- Lembaga		-
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Doku men	168.450.000	- Doku men	7.670.000	- Doku men	195.000	- Doku men	0%	7.865.000

N o.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Lapor an	110.087.200	- Lapor an	6.222.800	- Lapor an	760.800	- Lapora n	0%	6.983.600
6	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Doku men	183.209.950	- Doku men	89.006.014	1 Doku men	360.000	1 Doku men	33%	89.366.014
7	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	351 Orang	1.737.149.750	57 Orang	284.495.000	68 Orang	336.112.900	125 Orang	36%	620.607.900
8	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 orang	35.528.700	- orang	1.310.000	- orang	-	- orang	0%	1.310.000
9	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Doku men	76.085.500	- Doku men		- Doku men		- Doku men	0%	-
10	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Doku men	176.098.700	0 Doku men	30.090.500	- Doku men	76.514.000	0 Doku men	24%	106.604.500
11	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang	219.624.400	0 Orang	3.646.400	- Orang	-	0 Orang	3%	3.646.400

N o.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)						
					I		II								
1	2	3	4		5		6		7						
1 2	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan perencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2	Doku men	218.866.500	0	Doku men	3.015.952	-	Doku men		0	Doku men	1%	3.015.952
1 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	Lapor an	2.831.043.195	-	Lapor an	12.480.000	1	Lapor an	1.331.240.000	1	Lapora n	33%	1.343.720.000
1 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Doku men	8.290.500	-	Doku men	-	-	Doku men	-	-	Doku men	0%	-

N o.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)						
					I		II								
1	2	3	4		5		6		7						
1 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Doku men	11.546.800	-	Doku men	3.075.300	-	Doku men	3.075.300	-	Doku men	0%	6.150.600
1 6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Doku men	8.510.100	-	Doku men	500.000	-	Doku men	-	-	Doku men	0%	500.000
1 7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Doku men	11.758.400	-	Doku men	1.604.100	-	Doku men	2.406.150	-	Doku men	0%	4.010.250
1 8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lapor an	10.561.800	-	Lapor an	2.673.000	-	Lapor an	2.673.000	-	Lapora n	0%	5.346.000
1 9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	1	Lapor an	13.228.900	-	Lapor an	1.713.000	-	Lapor an	1.712.700	-	Lapora n	0%	3.425.700

N o.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan 20.617.100	-	Laporan 7.181.300	-	Laporan 5.068.200	-	Laporan 0%	12.249.500
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang 35.000.000	-	Orang -	-	Orang -	-	orang 0%	-
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket 204.630.900	-	Paket 6.304.100	-	Paket 151.373.534	-	Paket 0%	157.677.634
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan 23.018.600	-	Laporan 3.955.600	-	Laporan 3.955.600	-	Laporan 0%	7.911.200
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan 229.169.700	-	Laporan 123.415.128	-	Laporan 39.073.000	-	Laporan 0%	162.488.128

N o.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	226.536.641	- Unit		Unit		- Unit	0%	-
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.436.960	- Laporan	6.808.514	- Laporan	6.385.231	- Laporan	0%	13.193.745

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, hasil /keluaran yang direncanakan;

Realisasi Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan BKD Pada Tahun 2023 TW II, ada 5 (lima) sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan realisasi capaian kinerjanya sama dengan 50%. Adapun sub kegiatannya terdapat pada table di bawah ini :

N o.	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja	Capai an Kinerj a	Rp.
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	144.575.800	1 Dokumen	6.687.200	1 Dokumen	1.434.400	2 Dokumen	50%	8.121.600
2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	45.316.900	1 Laporan	13.619.700	2 Laporan	8.813.200	3 Laporan	50%	22.432.900
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.832.000	1 Dokumen	7.498.100	- Dokumen	337.500	1 Dokumen	50%	7.835.600
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.400.000	3 Paket	1.800.000	3 Paket	1.760.000	6 Paket	50%	3.560.000

N o.	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	28	Dokum en 12.805.200	6	Dokum en 3.600.000	8	Dokum en 3.600.000	14	Dokum en 50%	7.200.000

2.1.3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dari 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan BKD Pada Tahun 2023 TW II, ada 8 (delapan) sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan realisasi capaian kinerjanya lebih dari 50%. Adapun sub kegiatannya terdapat pada table di bawah ini :

N o.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Rp.
1	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	484.198.100	1 Dokumen	66.678.045	2 Dokumen	63.866.100	3 Dokumen	60%	130.544.145
2	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20.768.600	- Dokumen	16.466.100	1 Dokumen	4.259.500	1 Dokumen	100%	20.725.600
3	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	52 Dokumen	23.874.600	18 Dokumen	8.433.000	12 Dokumen	5.446.900	30 Usulan	58%	13.879.900
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/Bulan	8.890.260.358	76 Orang/Bulan	1.570.520.643	- Orang/Bulan	2.802.381.719	76 Orang/Bulan	100%	4.372.902.362
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.892.700	1 Paket	11.755.200	- Paket	11.753.700	1 Paket	100%	23.508.900

N o.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		
					I		II				
1	2	3	4		5		6		7		
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan 159.244.500	2	Laporan -	-	Laporan 76.031.209	2	Laporan 100%	76.031.209
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit 53.833.750	4	Unit 12.493.900	7	Unit 22.434.700	11	Unit 92%	34.928.600
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Unit 41.908.750	5	Unit 3.570.000	3	Unit 2.190.000	8	Unit 67%	5.760.000

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Adanya program yang harus mengacu kepada pusat, dalam artian BKD tidak bisa menentukan pekerjaannya secara langsung. Salah satu contohnya. Kegiatan seleksi ASN. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang capaian kinerjanya tidak tercapai 100%.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKD selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Anggaran berikutnya, dalam perencanaan penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan *output* kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 TWII. Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renstra BKD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tabel 2.1.

**REKAPITULASI EVLUASI HASIL ANALISIS PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA BKD KABUPATEN GARUT
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
				Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Total		136.616.326.159		22.206.820.402		20.406.851.330				17.869.615.123		17.834.615.123	
		Adum		44.189.501.702		10.069.660.497		9.642.218.024				10.223.598.728		10.188.598.728	
		Non Adum		92.426.824.457		12.137.159.905		10.764.633.306				7.646.016.395		7.646.016.395	
I	Program Kepegawaian Daerah	% Pemenuhan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kapasitas ASN	420 %	25.564.110.063	82 %	4.769.400.305	129,11 %	3.682.920.123	157 %	77 %	86 %	4.596.106.700	860	4.596.106.700	100%
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan ASN	5.700 oran	9.487.138.019	1500 oran	1.691.134.005	4,937 oran	1.030.112.550	329 %	61 %	8 Dokumen	1.449.675.700	8 Dokumen	1.449.675.700	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	15	Dokumen 5.838.573.638	5	Dokumen 1.010.308.355	4	Dokumen 507.501.250	71%	50%	3	Dokumen 1.011.185.200	3	Dokumen 1.011.185.200	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5	Dokumen 915.872.606	1	Dokumen 167.751.500	1	Dokumen 153.457.500	91%	91%	1	Dokumen 159.953.300	1	Dokumen 159.953.300	100%
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi yang difasilitasi	110	Lembaga 334.809.226	22	Lembaga 29.118.000	2	Lembaga 2.170.000	7%	7%	-	Lembaga -	-	Lembaga -	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem	5	Dokumen 579.355.399	1	Dokumen 344.717.650	1	Dokumen 246.127.800	71%	71%	2	Dokumen 168.450.000	2	Dokumen 168.450.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10					
		Informasi Kepegawaian																		
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	10	Laporan	1.818.527.150	3	Dokumen	139.238.500	3	Dokumen	120.856.000	87 %	87 %	2	Laporan	110.087.200	2	Laporan	110.087.200	100%
2	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi PNS	23.263	orang	2.634.489.000	5246	orang	836.670.200	3.029	orang	721.288.173	58 %	86 %	12	Dokumen	811.983.850	12	Dokumen	811.983.850	100%
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana	10	Dokumen	185.605.544	2	Dokumen	144.576.000	2	Dokumen	143.800.413	99 %	99 %	4	Dokumen	144.575.800	4	Dokumen	144.575.800	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
		dan Mutasi ASN antar Daerah														
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5	Dokumen	718.681.958	2079 orang	181.507.200	2.050 orang	178.950.000	99%	99%	3 Dokumen	183.209.950	3 Dokumen	183.209.950	100%
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	15	Dokumen	1.730.201.498	4 Dokumen	510.587.000	4 Dokumen	398.537.760	103%	78%	5 Dokumen	484.198.100	5 Dokumen	484.198.100	100%
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Peningkatan Kapasitas PNS	4.140	Orang	8.299.367.724	579 Orang	1.870.328.250	540 Orang	1.564.294.200	93%	84%	551 Orang	1.848.763.950	551 Orang	1.848.763.950	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	351	Orang	6.603.490.624	493	Orang	1.757.794.650	460	Orang	1.455.041.400	93%	83%	351	Orang	1.737.149.750	100%
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1.000	orang	1.407.964.000	86	orang	23.887.650	80	orang	22.205.700	93%	93%	200	orang	35.528.700	100%
	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional					1	Dokumen	88.645.950	1	Dokumen	87.047.100	98%	98%				
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional	5	Dokumen	287.913.100									1	Dokumen	76.085.500	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
		ASN														
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kinerja	45	Kegiatan	5.143.115.320	4	Kegiatan	371.267.850	4	Kegiatan	367.225.200	100%	5	Kegiatan	485.683.200	100%
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	Dokumen	254.618.058								1	Dokumen	20.768.600	100%
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan	5	Dokumen	1.035.805.946	4	Dokumen	96.908.850	4	Dokumen	95.375.250	98%	1	Dokumen	176.098.700	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
		Evaluasi Kinerja Aparatur													
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	45 Orang	411.206.116	9 Orang	199.480.000	9 Orang	199.480.000	100%	100%	9 Orang	219.624.400	9 Orang	219.624.400	100%
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	3.233.220.000	12 Laporan	59.271.400	12 Laporan	58.639.650	99%	99%	6 Laporan	45.316.900	6 Laporan	45.316.900	100%
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	260 Usulan	208.265.200	52 Dokumen	15.607.600	46 Dokumen	13.730.300	88%	88%	52 Dokumen	23.874.600	52 Dokumen	23.874.600	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10					
II	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	% Terpenuhi nya Pengembangan Kompetensi	500	%	66.862.714.394	84	%	7.367.759.600	63	%	7.081.713.183	75 %	96 %	86	%	3.049.909.695	86	%	3.049.909.695	100 %
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	7	Unit	1.453.938.000	1	Kebijakan	274.319.750	1	Kebijakan	211.086.800	100 %	77 %	2	Kebijakan	218.866.500	2	Kebijakan	218.866.500	100 %

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	10	Dokumen	1.453.938.000	1	Dokumen	274.319.750	1	Dokumen	211.086.800	100%	77%	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	Jumlah Peserta Pengebang	9.868	Orang	65.408.776.394	520	Orang	7.093.439.850	391	Orang	6.870.626.383	75%	97%	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
	Kompetensi Manajerial dan Fungsional	an Manajerial dan Fungsional													
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15	Laporan 65.408.776.394	4	Laporan 7.093.439.850	4	Laporan 6.870.626.383	97 %	97 %	3	Laporan 2.831.043.195	3	Laporan 2.831.043.195	100%
											-				

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% pemenuhan penunjang urusan BKD	500	44.189.501.702	100	10.069.660.497	96	9.642.218.024	96%	96%	100	10.223.598.728	100	10.188.598.728	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	35	Laporan 337.000.000	4	Laporan 71.706.600	4	Laporan 71.339.900	100%	99%	7	Laporan 74.728.500	7	Laporan 74.728.500	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen 463.740.521	3	Dokumen 65.977.600	3,00	Dokumen 65.610.900	100%	99%	2	Dokumen 10.832.000	2	Dokumen 10.832.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	4	Dokumen 16.581.000							1	Dokumen 8.290.500	1	Dokumen 8.290.500	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	16.581.000							1	Dokumen	11.546.800	1	Dokumen	11.546.800	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	16.581.000							1	Dokumen	8.510.100	1	Dokumen	8.510.100	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	16.581.000						1	Dokumen	11.758.400	1	Dokumen	11.758.400	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2	Laporan	16.581.000						1	Laporan	10.561.800	1	Laporan	10.561.800	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
		Realisasi Kinerja SKPD													
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	5	Laporan 383.458.392	1	Laporan 5.729.000	1	Laporan 5.729.000	136%	100%	1	Laporan 13.228.900	1	Laporan 13.228.900	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan	5	Laporan 32.708.559.345	1	Laporan 8.692.519.438	1	Laporan 8.367.857.878	100%	96%	1	Laporan 8.910.877.458	1	Laporan 8.910.877.458	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	Orang/Bulan	32.455.095.058	780	Orang/Bulan	8.668.902.238	780	Orang/Bulan	8.344.240.878	100%	96%	76	Orang/Bulan	8.890.260.358	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	Laporan	253.464.287	1	Laporan	23.617.200	1	Laporan	23.617.000	100%	100%	1	Laporan	20.617.100	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian BKD	3	Laporan 221.000.000				-			1	Laporan 35.000.000	1	Laporan 35.000.000	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang 221.000.000							5	Orang 35.000.000	5	Orang 35.000.000	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52	Jenis 7.880.140.630	10	Jenis 613.321.171	10	Jenis 532.528.816	100%	87%	11	Kegiatan 542.917.100	11	Kegiatan 542.917.100	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	53.542.270	7 Paket	9.160.200	7 Paket	9.160.200	100%	100%	12 Paket	23.400.000	12 Paket	23.400.000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.013.656.974	5 Paket	243.734.121	5 Paket	164.359.460	106%	67%	1 Paket	204.630.900	1 Paket	204.630.900	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	405.911.292	1 Paket	49.892.850	1 Paket	49.892.850	100%	100%	1 Paket	49.892.700	1 Paket	49.892.700	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	140	Dokumen	58.812.096	235	Dokumen	11.362.500	233	Dokumen	11.280.000	99%	99%	28	Dokumen	12.805.200	28	Dokumen	12.805.200	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	154.110.152	1	Laporan	20.505.000	1	Laporan	20.146.200	98%	98%	1	Laporan	23.018.600	1	Laporan	23.018.600	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	3.186.405.257	3	Laporan	278.666.500	3	Laporan	277.690.106	100%	100%	1	Laporan	229.169.700	1	Laporan	229.169.700	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi Pelayanan Terpadu Kepegawaian	2	sistem	1.007.702.589						0	-	0	-			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	7	orang	554.269.801	3	Unit	142.608.400	3	Unit	138.966.025	100%	1	Paket	226.536.641	100%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	449.768.907						7	Unit	226.536.641	7	Unit	226.536.641	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Unit 104.500.894							Jenis -	-	0	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	Unit 1.132.683.205	22	Unit 142.608.400	21	Unit 138.966.025	97 %	97 %	Laporan -	-	0	-	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
				Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa Kantor	17 Jenis	1.428.923.626	3 Jenis	297.548.242	3 Jenis	286.253.174	100%	96%	3 Laporan	363.619.829	3 Laporan	1.770.196.768	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	299.060.239	2 Laporan	42.164.283	2 Laporan	39.730.284	94%	94%	1 Jenis	69.683.893	1 Jenis	19.436.960	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1.129.863.387	2 Laporan	255.383.959	2 Laporan	246.522.890	97%	97%	2 Unit	293.935.936	2 Unit	159.244.500	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
				Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana penunjang kantor	28 Jenis	1.059.608.300	4 Jenis	251.956.646	4 Jenis	245.272.231	100%	97%	17 Unit	69.919.200	17 Unit	53.833.750	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	202.519.161	6 Unit	90.266.550	6 Unit	86.617.900	96%	96%	12 Gedung	59.779.200	12 Gedung	53.833.750	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	36 Unit	35.576.564	12 Unit	39.329.400	12 Unit	36.592.374	98%	93%	- Unit	-	- Unit	-	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024. (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
		atau Lapangan													
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah/Luas Bangunan yang Dipelihara/Direhab	4	Gedung 617.551.032	1	Gedung 30.000.000	1	Gedung 29.900.000	100%	100%			0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180	Unit 203.961.543	39	Unit 92.360.696	39	Unit 92.161.957	100%	100%	12	Unit 10.140.000	12	Unit 41.908.750	100%

Tabel 2.1.1.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BKD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BKD TAHUN 2019-2024
KABUPATEN GARUT
(Tabel T-C.29)

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Diklat

o .	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daera h Pena nggu ng Jawa b		
					I		II				K	Rp.			
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Total		17.869.615.123,0		2.372.862.496		5.177.247.043		7.550.109.539		62.621.794.424		45,84	
		Adum		10.223.598.728,0		1.768.467.885		3.136.211.543		4.904.679.428		33.994.847.713		76,93	
		Non Adum		7.646.016.395,0		604.394.611		2.041.035.500		2.645.430.111		28.626.946.711		30,97	
I	Program Kepegawaian Daerah	% Pemenuhan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kapasitas ASN	86 %	4.596.106.700,0	21,33 %	588.898.659	8,60 %	709.795.500	30 %	1.298.694.159	688 %	11.979.431.502	163,88	46,86	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan ASN	8 Dokumen	1.449.675.700,0	- Dokumen	68.466.700	4 Dokumen	212.988.500	4 Dokumen	281.455.200	13.301 orang	4.402.091.671	233,35	46,40	BKD

o .	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Penan ggung Jawa b
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	1.011.185.200,0	- Dokumen	24.469.500	1 Dokumen	132.827.200	1 Dokumen	157.296.700	18 Dokumen	3.083.898.421	120,00	52,82	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	159.953.300,0	- Dokumen	30.104.400	- Dokumen	79.205.500	- Dokumen	109.309.900	17 Dokumen	513.349.700	340,00	56,05	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi yang difasilitasi	- Lembaga	-	- Lembaga	-	- Lembaga		- Lembaga	-	110 Lembaga	27.277.450	100,24	8,15	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	168.450.000,0	- Dokumen	7.670.000	- Dokumen	195.000	- Dokumen	7.865.000	7 Dokumen	322.195.600	140,00	55,61	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Laporan	110.087.200,0	- Laporan	6.222.800	- Laporan	760.800	- Laporan	6.983.600	12 Laporan	455.370.500	120,00	25,04	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi PNS	12 Dokumen	811.983.850,0	8 Dokumen	162.371.259	- Dokumen	65.660.500	8 Dokumen	228.031.759	13.978 orang	1.469.606.432	60,09	55,78	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawa b
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	144.575.800 ,0	1 Dokumen	6.687.200	1 Dokumen	1.434.400	2 Dokumen	8.121.600	11 Dokumen	220.079.513	110,00	118,57	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Dokumen	183.209.950 ,0	- Dokumen	89.006.014	1 Dokumen	360.000	1 Dokumen	89.366.014	2.140 Dokumen	406.151.014	42.800 ,00	56,51	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	484.198.100 ,0	1 Dokumen	66.678.045	2 Dokumen	63.866.100	3 Dokumen	130.544.145	158 Dokumen	843.375.905	1.053,33	48,74	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Peningkatan Kapasitas PNS	551 Orang	1.848.763.950,0	62 Orang	285.805.000	4 Orang	336.112.900	66 Orang	621.917.900	2.715 Orang	5.138.554.799	65,58	61,92	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	351 Orang	1.737.149.750,0	57 Orang	284.495.000	68 Orang	336.112.900	125 Orang	620.607.900	336 Orang	4.965.191.559	95,61	75,19	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 orang	35.528.700,0	- orang	1.310.000	- orang	-	- orang	1.310.000	600 orang	62.192.500	60,00	4,42	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b		
					I		II										
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12		
	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional				0		0		0	-							
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1	Dokumen	76.085.500,0	-	Dokumen	-	Dokumen	-	3	Dokumen	-	60,00	0,00		
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kinerja	5	Kegiatan	485.683.200,0	-	Kegiatan	72.255.700	-	Kegiatan	167.289.300	27	Kegiatan	969.178.600	60,00	18,84	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	20.768.600,0	-	Dokumen	16.466.100	1	Dokumen	20.725.600	1	Dokumen	54.135.800	20,00	21,26	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	176.098.700,0	-	Dokumen	30.090.500	-	Dokumen	76.514.000	-	Dokumen	106.604.500	-	35,62	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9	Orang	219.624.400,0	-	Orang	3.646.400	-	Orang	3.646.400	-	Orang	318.220.000	-	77,39	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	45.316.900,0	1 Laporan	13.619.700	2 Laporan	8.813.200	3 Laporan	22.432.900	3 Laporan	200.252.350	60,00	6,19	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	52 Dokumen	23.874.600,0	18 Dokumen	8.433.000	12 Dokumen	5.446.900	30 Usulan	13.879.900	30 Usulan	27.610.200	11,54	13,26	
									-						
II	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	% Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	86 %	3.049.909.695,0	0 %	15.495.952	13 %	1.331.240.000	13 %	1.346.735.952	413 %	16.647.515.209	82,57	24,90	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	2 Kebijakan	218.866.500,0	- Kebijakan akan	3.015.952	- Kebijakan akan	-	- Kebijakan akan	3.015.952	7 Kebijakan akan	688.514.702	102,86	47,36	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b	
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9	10		11		12	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	218.866.500,0	0 Dokumen	3.015.952	- Dokumen		0 Dokumen	3.015.952	11 Dokumen	688.514.702	110,28	47,36	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta Pengembangan Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	2.831.043.195,0	- Laporan	12.480.000	- Laporan	1.331.240.000	- Laporan	1.343.720.000	5.935 Orang	15.959.000.507	60,14	24,40	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	2.831.043.195,0	- Laporan	12.480.000	1 Laporan	1.331.240.000	1 Laporan	1.343.720.000	Laporan				

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b			
				I		II									
1	2	3	6	7		8			9	10		11	12		
									-						
II I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% pemenuhan penunjang urusan BKD	100 %	10.223.598.728,0	17 %	1.768.467.885	31 %	3.136.211.543	48 %	4.904.679.428	348 %	33.994.847.713	69,60	76,93	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	7 Laporan	74.728.500,0	- Laporan	17.063.500	- Laporan	10.204.650	- Laporan	27.268.150	21 Laporan	163.166.620	60,00	48,42	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.832.000,0	1 Dokumen	7.498.100	- Dokumen	337.500	1 Dokumen	7.835.600	14 Dokumen	132.291.070	140,00	28,53	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.290.500,0	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	-	0,00	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Penan ggung Jawa b		
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9	10	11	12			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen 11.546.800,0	-	Dokumen 3.075.300	-	Dokumen 3.075.300	-	Dokumen 6.150.600	-	Dokumen 6.150.600	-	37,09	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen 8.510.100,0	-	Dokumen 500.000	-	Dokumen -	-	Dokumen 500.000	-	Dokumen 500.000	-	3,02	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen 11.758.400,0	-	Dokumen 1.604.100	-	Dokumen 2.406.150	-	Dokumen 4.010.250	-	Dokumen 4.010.250	-	24,19	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1	Laporan 10.561.800,0	-	Laporan 2.673.000	-	Laporan 2.673.000	-	Laporan 5.346.000	-	Laporan 5.346.000	-	32,24	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h P ena nggu ng Jawa b	
					I		II							
1	2	3	6		7		8		9	10		11	12	
		Kinerja SKPD												
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	13.228.900,0	- Laporan	1.713.000	- Laporan	1.712.700	- Laporan	3.425.700	4 Laporan	14.868.700	80,00	3,88
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan	1 Laporan	8.910.877.458,0	- Laporan	1.577.701.943	Laporan	2.807.449.919	- Laporan	4.385.151.862	3 Laporan	26.783.045.539	60,00	81,88
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/Bulan	8.890.260.358,0	76 Orang/Bulan	1.570.520.643	- Orang/Bulan	2.802.381.719	76 Orang/Bulan	4.372.902.362	287 Orang/Bulan	26.708.750.639	82,00	82,29

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pengu nggu Jawa b
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	1 Laporan	20.617.100,0	- Laporan	7.181.300	- Laporan	5.068.200	- Laporan	12.249.500	3 Laporan	74.294.900	60,00	29,31	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian BKD	1 Laporan	35.000.000,0	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	2 Laporan	-	60,00	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	35.000.000,0	- Orang	-	- Orang		- orang	-	15 orang	-	60,00	0,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Kegiatan	542.917.100,0	5 Kegiatan	150.830.028	- Kegiatan	211.515.834	5 Kegiatan	362.345.862	71 Jenis	3.374.522.090	136,92	42,82	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b	
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.400.000,0	3 Paket	1.800.000	3 Paket	1.760.000	6 Paket	3.560.000	48 Paket	33.895.400	80,00	63,31	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	204.630.900,0	- Paket	6.304.100	1 Paket	151.373.534	1 Paket	157.677.634	4 Paket	1.713.598.399	80,00	56,86	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.892.700,0	1 Paket	11.755.200	- Paket	11.753.700	1 Paket	23.508.900	4 Paket	189.238.150	80,00	46,62	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 Dokumen	12.805.200,0	6 Dokumen	3.600.000	8 Dokumen	3.600.000	14 Dokumen	7.200.000	98 Dokumen	37.167.200	70,00	63,20	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	23.018.600,0	- Laporan	3.955.600	- Laporan	3.955.600	- Laporan	7.911.200	113 Laporan	47.647.400	2.260,00	30,92	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	229.169.700 ,0	- Laporan	123.415.1 28	- Laporan	39.073.00 0	- Laporan	162.488.1 28	3 Laporan	1.352.975.5 41	60,00	42, 46	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi Pelayanan Terpadu Kepegawaian	- sistem	-	- siste m	-	- siste m	-	- siste m	-	284 siste m	-	14.210 ,00	0,0 0	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	226.536.64 1,0	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	2.897 orang	2.276.737.2 29	41.38 8,57	41 0,7 6	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaran Dinas Jabatan	7 Unit	226.536.641 ,0	- Unit		- Unit		- Unit	-	1 Unit	550.900.000	60,00	12 2,4 9	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	- Unit	-	- Unit		Unit		- Unit	-	4 Unit	-	60,00	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	- Unit		Unit		- Unit	-	- Unit	1.725.837.229	-	152,37	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa Kantor	3 Jenis	363.619.829,0	3 Jenis	6.808.514	- Jenis	82.416.440	3 Jenis	89.224.954	6 Jenis	833.738.702	35,29	58,35	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	69.683.893,0	- Laporan	6.808.514	- Laporan	6.385.231	- Laporan	13.193.745	836 Laporan	95.478.650	16.720,00	31,93	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b
					I		II								
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12
		Disediakan													
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	293.935.936 ,0	2 Laporan	-	- Laporan	76.031.209	2 Laporan	76.031.209	841 Laporan	738.260.052	8.410,00	65,34	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana penunjang kantor	17 Jenis	69.919.200 ,0	2 Jenis	16.063.900	2 Jenis	24.624.700	4 Jenis	40.688.600	104 Jenis	563.637.533	371,43	53,19	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	59.779.200,0	4 Unit	12.493.900	7 Unit	22.434.700	11 Unit	34.928.600	48 Unit	185.181.035	80,00	91,44	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Unit	-	- Unit		- Unit	-	- Unit	-	22 Unit	51.229.474	60,00	144,00	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b				
					I	II													
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah/Luas Bangunan yang Dipelihara/Direhab	-	Gedung	-	Unit	-	Unit	-	Gedung	-	24	Gedung	202.925.067	600,00	32,86			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Unit	10.140.000,0	5	Unit	3.570.000	3	Unit	2.190.000	8	Unit	5.760.000	116	Unit	124.301.957	64,44	60,94
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										29,69%		42,57%	99,80%		40,70%				
Predikat Kinerja									Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				17.869.615.123						7.550.109.539									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)									33,37%		42,25%	3747,05%		2639,08%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)									Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi					

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun n-1 (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Resntra yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	unit Peran gkat Daera h Pena nggu ng Jawa b
				I	II				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja :									
Faktor Penghambat Penampilan Kenarja :									
Tindaklanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :									
Tindaklanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya :									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan kepada Peraturan Bupati Berdasarkan Nomor 270 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut,

Adapun tugas, fungsi dan uraian tugas, pada bagian kesatu yang berkaitan dengan Badan, diatur dalam pasal 2,

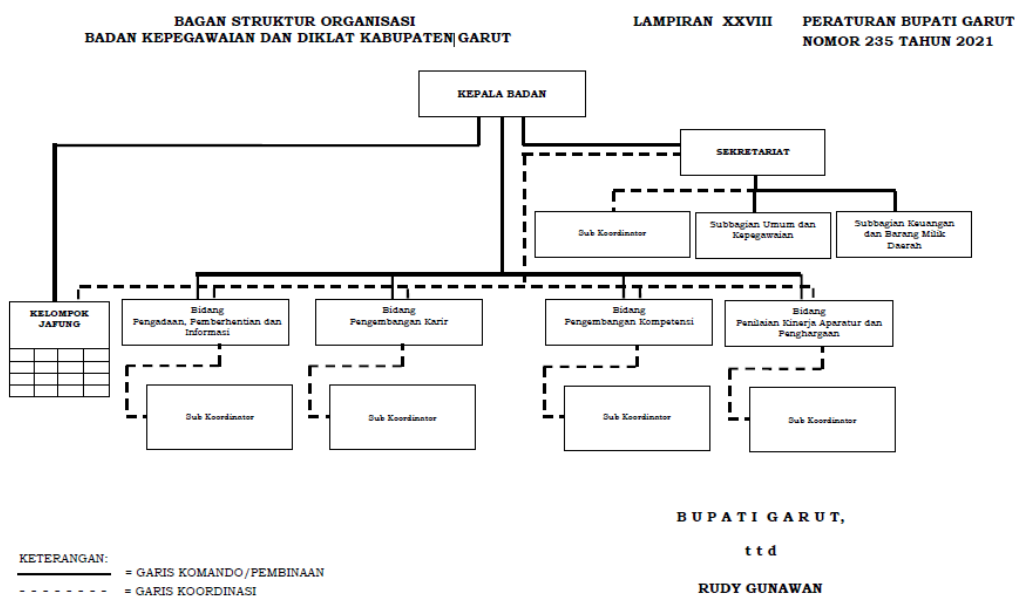
1. Badan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas dan fungsi Badan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
3. Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Kepala Badan, membawahkan:

- a. Sekretaris, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Mili Daerah; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan:

1. Sub Koordinator Pengadaan;
 2. Sub Koordinator Pemberhentian; dan
 3. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- c. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan:
1. Sub Koordinator Mutasi;
 2. Sub Koordinator Kepangkatan;
 3. Sub Koordinator Promosi.
- d. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, membawahkan:
1. Sub Koordinator Penilaian Kompetensi;
 2. Sub Koordinator Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi; dan
 3. Sub Koordinator Diklat Teknis Fungsional.
- e. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan membawahkan:
1. Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
 2. Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II; dan
 3. Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan.
 4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu satu tahun 2020 Sehingga untuk melaksanakan evaluasi dalam program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya disusun dalam sebuah laporan kinerja instansi Pemerintah dan kedalamannya tercantum perencanaan kinerja.

Realisasi Tujuan 1 BKD : Indeks Kepuasan Masyarakat

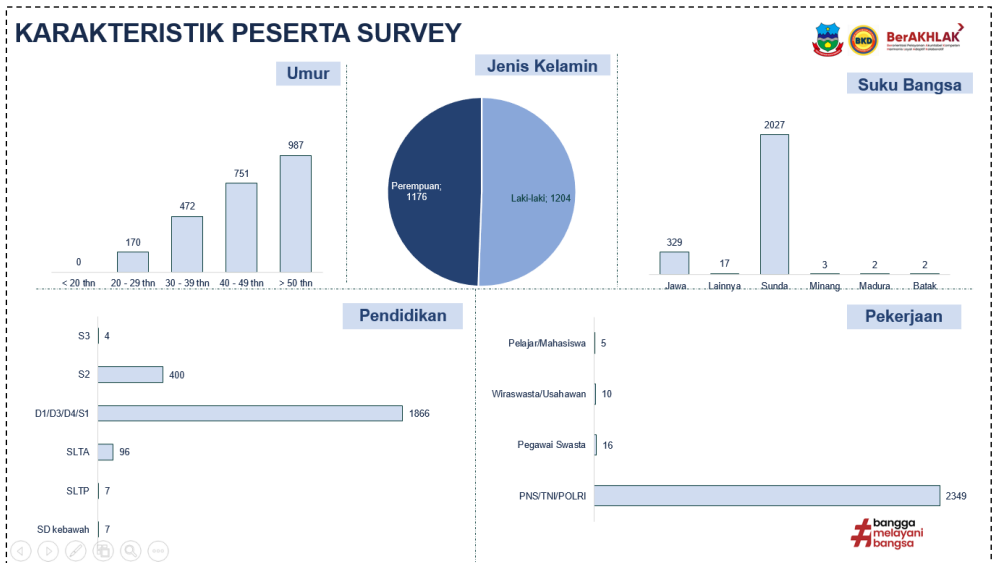
Capaian Kinerja Tujuan 1

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan prima bidang kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	74,75	77,46	80,26

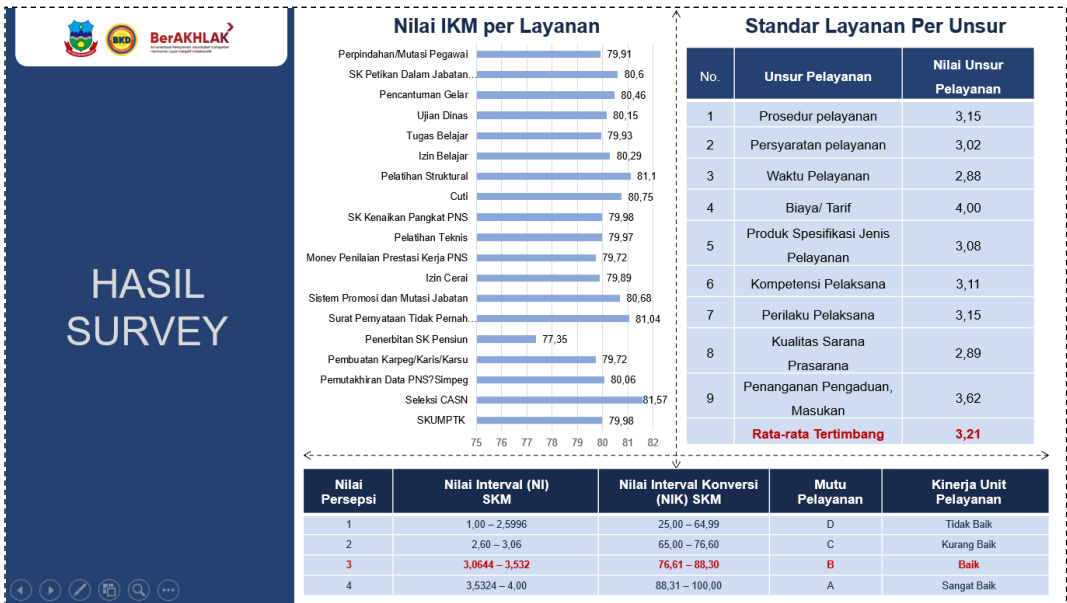
Gambar 2.3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD Tahun 2022

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN GARUT SEMESTER II TAHUN 2022	
NILAI IKM	LAYANAN KEPEGAWAIAN BKD KABUPATEN GARUT
80,26	RESPONDEN JUMLAH : 2380 Orang JENIS KELAMIN : L = 1204 Orang / P = 1176 Orang PENDIDIKAN : SD = 7 Orang SMP = 7 Orang SMA = 96 Orang S1 = 1866 Orang S2 = 400 Orang S3 = 4 Orang Periode Survey : 19-12-2022 s/d 22-12-2022
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Gambar 2.4
Karakteristik Peserta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BKD



Kab. Garut Tahun 2022
Gambar 2.5
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BKD Kab. Garut Tahun 2022



Secara umum kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut tahun 2022 dipersepsikan "Baik" oleh masyarakat/aparatur sipil negara sebagai pengguna. Hal ini terindikasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 80,26 atau berada pada interval 76,61 – 88,30 yang berarti mutu pelayanannya adalah "B" dan dikategorikan berkinerja **BAIK**.

Namun ada salah satu layanan, yaitu layanan Penerbitan SK Pensiun, yang mendekati nilai kurang baik dengan nilai 77,35. Sedangkan penilaian terhadap Unsur Prosedur Pelayanan, bila :

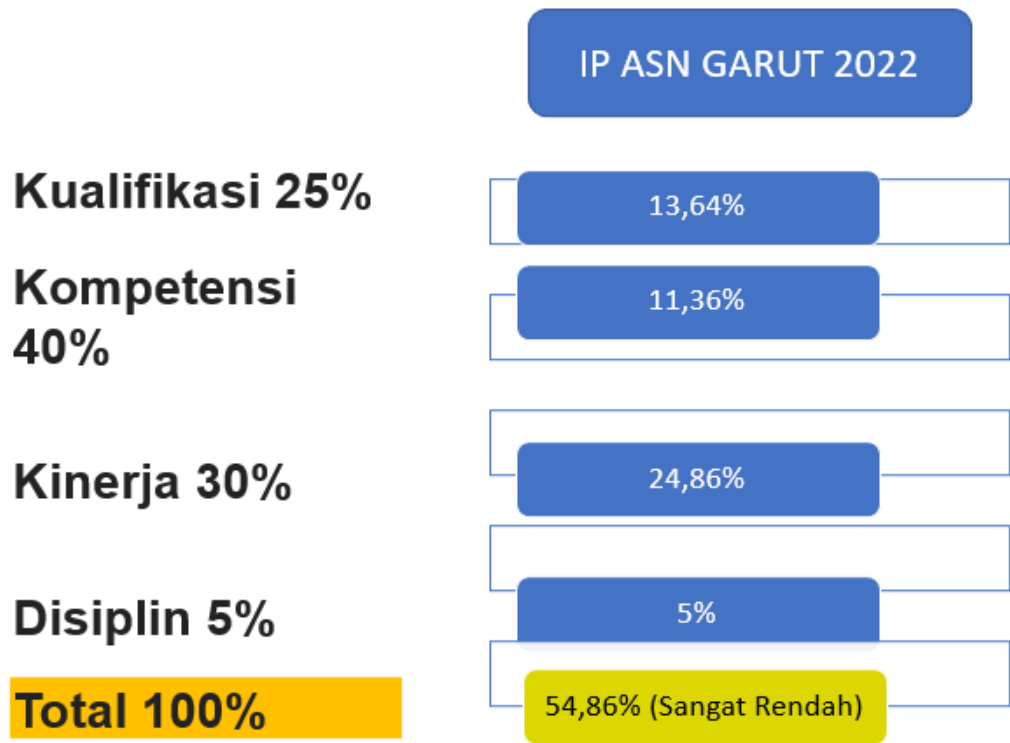
- a. Diberi nilai 1 (tidak baik) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- b. Diberi nilai 2 (kurang baik) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- c. Diberi nilai 3 (sesuai) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- d. Diberi nilai 4 (sangat baik) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Terdapat 2 (dua) unsur pelayanan dengan nilai kurang baik, di bawah nilai 3, yaitu unsur waktu pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana, masing-masing nilainya adalah 2,88 dan 2,89. Dengan perolehan nilai tersebut mengandung arti bahwa prosedur pelayanan masih belum mudah sehingga prosesnya belum efektif.

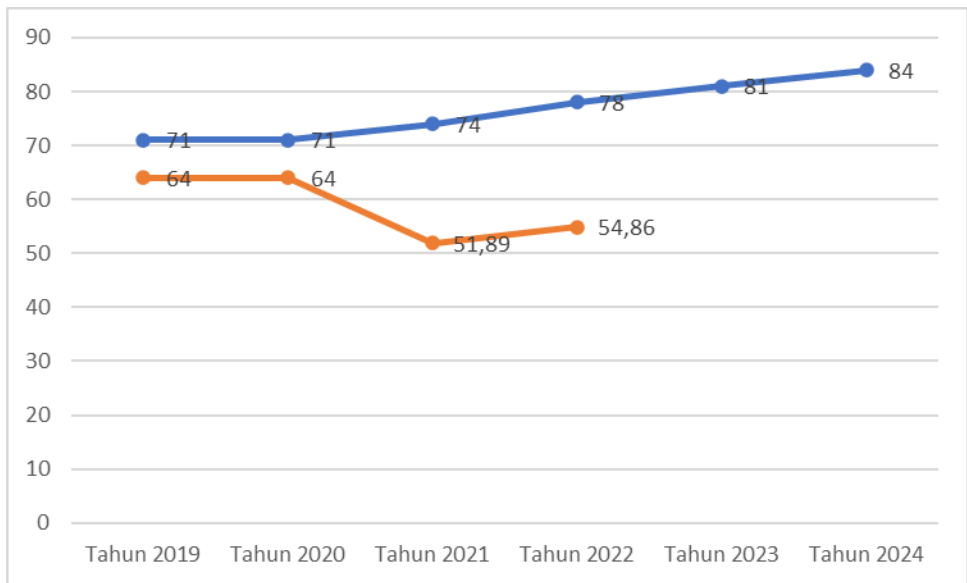
Adapun untuk target IKM tahun 2022 adalah 88 dengan realisasi 80,26, tidak tercapainya target menurut survey adalah unsur sarana dan prasarana dengan nilai 2,83. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah melakukan renovasi sarana dan prasarana di lingkungan BKD sesuai dengan anggaran yang tersedia (sesuai Gambar 2.5)

Realisasi Tujuan 2 BKD : Indeks Profesionalitas
Capaian Kinerja Tujuan 2

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tujuan 2 : Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas	71	74	78	64	51,89	54,86



Grafik 2.2
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kab. Garut



- b. Nilai dimensi kompetensi dari pengembangan kompetensi pegawai setiap tahun melalui pelatihan klasikal dan non klasikal, jadi besar kecilnya nilai dipengaruhi oleh banyaknya penyelenggaraan diklat/seminar bersertifikat;
- c. Nilai dimensi kinerja didapat dari laporan SKP, jadi besar kecilnya Nilai dipengaruhi oleh banyaknya nilai SKP yang dilaporkan;
- d. Nilai dimensi disiplin didapat dari laporan hukuman disiplin, jadi besar kecilnya Nilai dipengaruhi oleh sedikitnya laporan hukuman disiplin yang dilaporkan.

Hasil pemenuhan data Indeks Profesionalitas ASN Kab. Garut tahun 2022, berdasarkan hasil rekapitulasi Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Desember 2022 sangat rendah sekali. Pada tahun 2022 PNS yang mengikuti seminar hanya tercatat 4 (empat) orang, yang mengikuti pelatihan teknis hanya 1 (satu) orang, yang mengikuti pelatihan fungsional sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) orang. Jumlah pejabat eselon 2 (dua) sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, Eselon 3 (tiga) sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang, Eselon 4 (empat) sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang.

Berdasarkan Renstra hasil reviu tersebut, BKD memiliki 2 (dua) indikator sasaran strategis, 1 indikator kinerja utama, dan 3 indikator program dengan pencapaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : Penguatan Sistem Manajemen ASN
berdasarkan Sistem Merit**
Indikator 1 : Indeks Merit Manajemen ASN

Capaian Sasaran Strategis 1

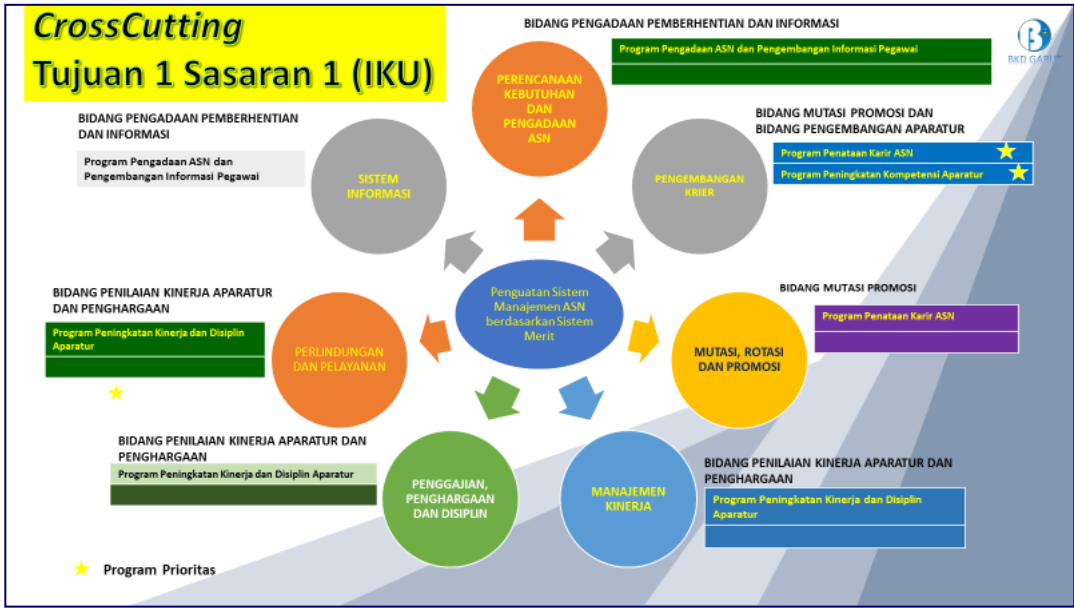
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sasaran Strategis 1 : Penguatan Sistem Manajemen ASN	Indeks Merit Manajemen ASN	0,61	0,66	0,71	0,48	0,64	0,63

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
berdasarkan Sistem Merit							

Grafik 2.3
Capaian Indeks Merit Manajemen ASN



Gambar 2.7
CrossCutting Tujuan dan Sasaran IKU

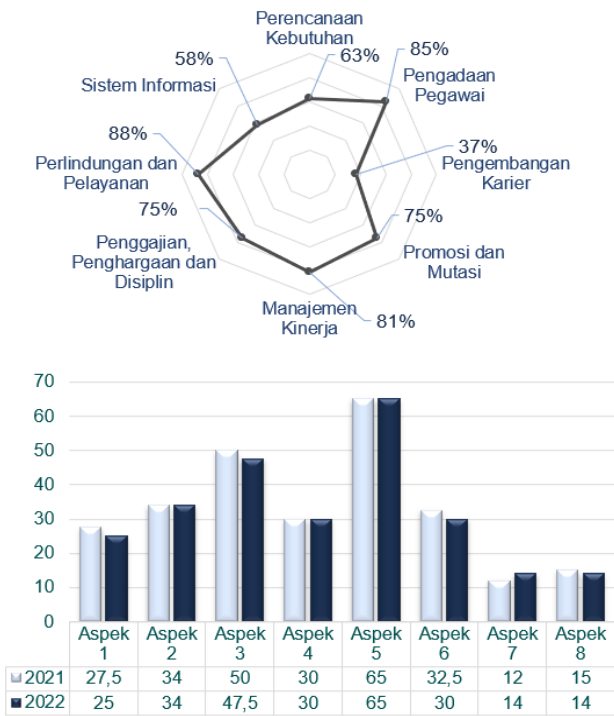


Tabel 2.1.2.
Penilaian Sistem Merit Tahun 2021 – 2022

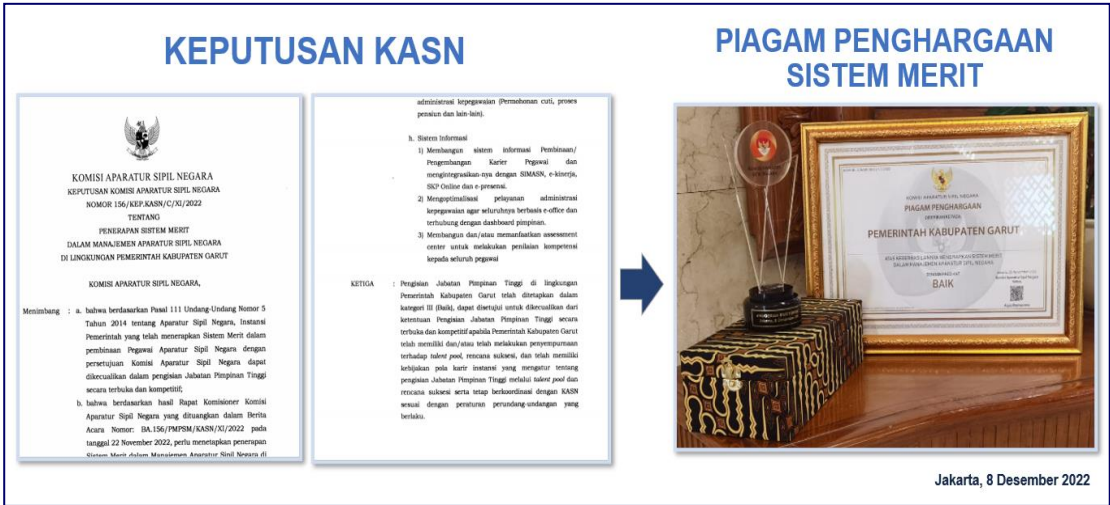
No	Aspek	Nilai Maksimal		Nilai 2021		Nilai 2022	
1.	Perencanaan Kebutuhan	40	100%	27,5	69%	25	63%
2.	Pengadaan Pegawai	40	100%	34	85%	34	85%
3.	Pengembangan Karier	130	100%	50	38%	47,5	37%
4.	Promosi dan Mutasi	40	100%	30	75%	30	75%
5.	Manajemen Kinerja	80	100%	65	81%	65	81%
6.	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	100%	32,5	81%	30	75%
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	100%	12	75%	14	88%
8.	Sistem Informasi	24	100%	15	63%	14	58%
	Jumlah	410		266		259.5	

Nilai Indeks Sistem Merit Tahun 2022 adalah 410 dibagi 259,5 adalah 63.

Grafik 2.4
Penilaian Sistem Merit Tahun 2021 – 2022



Gambar 2.8
Keputusan KASN dan Piagam Penghargaan Sistem Merit Tahun 2022



Capaian indeks Sistem Merit Kabupaten Garut tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.
Capaian Nilai Sistem Merit Kab. Garut Tahun 2022

No.	Aspek	Nilai Maksimal	Nilai 2022	% Nilai 2022
1	Perencanaan Kebutuhan	40	25	62,50%
2	Pengadaan	40	34	85,00%
3	Pengembangan Karier	130	47,5	36,54%
4	Promosi dan Mutasi	40	30	75,00%
5	Manajemen Kinerja	80	65	81,25%
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	30	75,00%
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	14	87,50%
8	Sistem Informasi	24	14	58,33%
	Total	410	259,50	
	Indeks Sistem Merit		63,29%	

Sasaran Strategis 2 : Mewujudkan BKD yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Indikator 2 : Nilai Implementasi SAKIP BKD

Sasaran Strategis Akuntabilitas Internal BKD

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan	Nilai Implementasi SAKIP BKD	86	87	88	79,44	81,61	85,75

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
BKD yang berkinerja tinggi dan Akuntabel							

Hasil Penilaian SAKIP BKD Tahun 2022

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4	Evaluasi Internal	25,00	20,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Tingkat Akuntabilitas (kategori)		85,75 (A)
	Interpretasi : MEMUASKAN	MEMUASKAN	

Gambar 2.9
Piagam Penghargaan AKIP BKD Kab. Garut Tahun 2022



Tabel 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra BKD 2019-2024					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tujuan 1 :		Indeks Kepuasan Masyarakat											
1	Terwujudnya pelayanan prima bidang kepegawaian	-		86	87	88	89	90	77,46	78,86	80,26	89	90	-
	Sasaran Strategis 1 :		Nilai Implementasi SAKIP BKD											
2	Mewujudkan BKD yang berkinerja tinggi dan Akuntabel	-		86	87	88 (A)	89	90	79,44	81,61	85,75 (A)	89	90	-
	Tujuan 2 :		Indeks Profesionalitas											
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN	-		71	74	78	81	84	64	51,89	54,86	81	84	-

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra BKD 2019-2024					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sasaran Strategis 2 :													
4	Penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	-	Indeks Merit Manajemen ASN	0,61	0,66	0,71	0,76	0,81	0,48	0,64	0,63	0,76	0,81	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

Isu-isu Strategis pada RPJMD 2019 - 2024 merupakan bagian dari tahapan pembangunan keempat RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Periode Tahun 2019 - 2024 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis Daerah adalah :

- 1. Belum Terpenuhinya profesionalisme sumber daya aparatur;*
- 2. Belum Terpenuhinya Sistem manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit yang mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja.*
- 3. Belum Terpenuhinya kebutuhan pegawai di tiap SKPD.*

Lebih lanjut dipaparkan isu-isu strategis, sebagai berikut :

- 1. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan teknis;*
- 2. Penerapan secara konsisten atas peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip “The Right Man On The Right Job” melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *fit and profer test*;*

3. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
4. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespons isu-isu terkait globalisasi dan *civil society*.

Dari hasil pemetaan faktor-faktor lingkungan strategi yang berada di lingkup BKD Kabupaten Garut tersebut, maka dapat diketahui dan dapat disampaikan isu strategi yang berkaitan dengan:

2.3.1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian atas pelaksanaan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan di hadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut. Permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.

Salah satu isu strategis pembangunan Bidang Kepegawaian dan pendidikan Kabupaten Garut 2019 – 2024, khusus pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, yaitu :

1. *Masih rendahnya profesionalisme sumber daya aparatur*

2. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja.
3. Masih rendahnya pemerataan pegawai di tiap SKPD.

Dari analisis isu strategis, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudahan pelayanan dapat terlayani dengan baik. Adapun dari hasil analisis lingkungan Daerah, untuk mewujudkan pelayanan publik, yang menjadi kekuatan adalah tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan.

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti permasalahannya, yaitu :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan aparatur dari segi jumlah dan komposisi terkait dengan kebijakan *minus growth* dimana penerimaan PNS baru di harus lebih kecil dibandingkan dengan yang Purna tugas (pensiun);
2. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas serta aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, mampu merespons isu-isu terkait globalisasi dan *civil society* melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Dibutuhkannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan (belum tersedianya gedung *Assesment center*);

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Diklat, yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah melanjutkan program dan kegiatan yang

belum tercapai pada target Renstra periode sebelumnya, sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2019-2024 sebagai konsekuensi dalam upaya mendukung program Pemerintah Daerah 5 tahun mendatang.

2. Identifikasi Masalah Berdasarkan Program Dan Kegiatan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian atas pelaksanaan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yang dituangkan dalam program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	1. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur.	Belum adanya Perencanaan Pegawai yang Akuntabel	Penyusunan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan ABK belum sesuai siklus anggaran
	2. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi dan remunerasi yang adil dan layak		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan PNS dan PPPK Belum disusun untuk jangka waktu 5 tahun
			Sistem Informasi ASN (Sistem Informasi Pegawai) belum sepenuhnya menampilkan kebutuhan data dalam perencanaan kebutuhan pegawai.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja. 3. Masih rendahnya pemerataan pegawai di tiap SKPD.	Sistem Pengadaan Pegawai (rekrutmen, seleksi) belum optimal	Rekrutmen belum berdasarkan pegawai yang akan memasuki masa Purna bakti
		Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) belum berjalan secara Efektif	Belum terpenuhinya Karier ASN sesuai dengan jenjang karier semestinya
			Belum selesainya analisis pengangkatan jabatan dan fungsional
		Penerapan manajemen karier yang belum efektif	Belum selesainya <i>Training Need Analysis</i> (TNA)/ Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
			Sentralisasi Diklat yang tidak Optimal, karena belum adanya komitmen yang berarti antar perangkat daerah.(belum didukung dengan peraturan bupati tentang sentralisasi diklat)
			Belum adanya <i>talent mapping</i> (Pemetaan Kompetensi), <i>succession & career planning</i> (Pola Karier).
			Belum optimalnya kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			pelatihan sebagai prasyarat jabatan
			Belum adanya evaluasi pengembangan kompetensi
			Belum adanya Rencana, pola dan Pengembangan Karier
			Belum adanya <i>position & performance based salary</i>
			Belum adanya Sistem Manajemen Karier yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.
			Belum ditetapkannya rencana suksesi yang ditetapkan dalam setiap tahun untuk promosi Jabatan Administrator
			Belum adanya evaluasi pengembangan karier
			Belum adanya Payung Hukum Tenaga Honorer yang Harus Diperbaharui untuk mengakomodir kebijakan tentang Tenaga Honorer.
		Pengelolaan kinerja pegawai belum dilaksanakan secara baik	Penilaian Kinerja PNS harus dilakukan berdasarkan perencanaan tingkat individu dan tingkat unit organisasi , dengan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			memperhatikan target, capaian, hasil (<i>Outcome</i>), dampak (<i>impact</i>) dan manfaat (<i>benefit</i>) yang dicapai, serta perilaku PNS secara optimal
			Belum adanya peraturan tentang bantuan hukum sebagai salah satu perlindungan ASN
		Belum adanya Pengembang an kualitas pegawai	Penempatan Jabatan belum sesuai jenjang pendidikan dan keahliannya
		Penegakan Disiplin Pegawai belum Optimal	Belum efektifnya sanksi atas tidak tercapainya kinerja
		Remunerasi	Remunerasi/TKD tersentralisasi dengan penggajian.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Garut, Badan Kepegawaian dan Diklat mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD, adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT adalah Misi ke-2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024,

yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi kedua ini dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerja sama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah, diantaranya adalah mendorong adanya pelayanan publik secara mudah, cepat dan tuntas, pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan amanah, mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuntut pelayanan yang profesional bagi semua SKPD dan masyarakat, Untuk mencapai hal tersebut maka Tantangan pelayanan BKD ke depan tentunya akan semakin kompleks dilihat dari perkembangan lingkungan internal dan eksternal.

2.3.4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

Beberapa tantangan dan peluang yang dapat diidentifikasi dan diperkirakan dihadapi BKD lima tahun ke depan antara lain:

1. Tantangan :

a. Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat, antara lain pelaksanaan reformasi birokrasi, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Kepegawaian yang telah disahkan dan terbitnya PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang ini membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan dan manajemen aparatur birokrasi yang mempunyai implikasi dalam kebijakan dan strategi pengelolaan dan manajemen birokrasi pada tatanan lokal/dasar;

b. Reformasi Birokrasi.

Dalam kerangka pengelolaan SDM Aparatur, reformasi birokrasi diharapkan mampu melahirkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Hal ini tentunya berimplikasi dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi, peningkatan kualitas SDM.

c. Teknologi informasi (TI)

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, menuntut SDM aparatur birokrasi mempunyai kemampuan/melakukan akselerasi pemanfaatan dan pemberdayaan

teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan Secara makro, teknologi ini juga bisa dimanfaatkan.

- d. Belum terpenuhinya kebutuhan aparatur dari segi jumlah dan komposisi terkait dengan kebijakan *plus growth* dimana penerimaan PNS baru harus lebih besar dibandingkan dengan yang Purna tugas (pensiun);
- e. Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen ASN dengan basis sistem merit. Dengan kata lain, pendekatan tradisional yang menempatkan PNS sebagai alat kelengkapan birokrasi telah diubah dengan pendekatan modern yang menempatkan PNS sebagai kunci penting dalam proses pembangunan nasional.

2. Peluang :

Sedangkan peluang Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut dalam pengembangan pelayanan, yaitu:

- a. Adanya kebijakan Pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*Good Government*) dan tata Pemerintahan yang bersih (*Clean Govenance*), sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan.
- b. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center* meskipun belum tersedianya sarana prasaran berupa gedung *Assesment center*.
- c. Penerapan pengembangan absensi Online yang akan terintegrasi dengan evaluasi kinerja berbasis Online dan sistem penggajian sehingga mampu mendeteksi secara dini terhadap penegakan *rewards and punishment* yang lebih tegas;

- d. Terbukanya kesempatan yang luas untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia secara formal dan non formal baik itu yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun lembaga pendidikan lainnya;
- e. Pengembangan ASN berbasis sistem merit di masa yang akan datang menyimpan sejumlah peluang dan tantangan. Dengan adanya UU ASN telah memberikan fondasi hukum yang kuat bagi pengelolaan pegawai dengan dasar-dasar merit atau prestasi. Secara empiris, hal ini dapat dilihat dari akses lapangan kerja pegawai negeri sipil yang semakin setara dan tidak diskriminatif. Tingkat pendidikan pegawai juga menunjukkan kecenderungan positif.
- f. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
- g. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar ASN berdisiplin dan profesional dalam rangka penataan manajemen PNS;

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu Strategis pada RPJMD 2019-2024 merupakan bagian dari tahapan pembangunan kedua RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Periode Tahun 2019 - 2024 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis Daerah, Lebih lanjut dipaparkan isu-isu strategis, sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
2. Penerapan secara konsisten atas peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip “*The Right Man On The Right Job*” melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *fit and profer test*;
3. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
4. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespons isu-isu terkait globalisasi dan *civil society*.

Dari hasil pemetaan faktor-faktor lingkungan strategis yang berada dilingkup BKD Kabupaten Garut tersebut, maka dapat diketahui dan dapat disampaikan isu strategis yang berkaitan dengan Isu strategis hasil interaksi pemetaan faktor kekuatan dengan peluang :

- a. Mendayagunakan tugas fungsi BKD untuk penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara profesional;
- b. Mendayagunakan semakin mantapnya kerja-sama dan koordinasi di BKD untuk mengoptimalkan pemanfaatan tersedianya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah;
- c. Mendayagunakan jumlah SDM Aparatur BKD untuk mengoptimalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga

Diklat berkualitas yang menawarkan kerja sama jenis Diklat dan kursus;

- d. Mendayagunakan Semakin baiknya sarana dan prasarana BKD untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk direkrut sebagai CPNS;
 - e. Mendayagunakan tingkat pendidikan SDM Aparatur BKD untuk mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan.
1. Isu strategis hasil interaksi pemetaan faktor kekuatan dengan tantangan :
 - a. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tugas fungsi BKD untuk penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara profesional guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Mendayagunakan semakin mantapnya kerja sama dan koordinasi di BKD untuk mengatasi tingginya permasalahan yang berkaitan dengan kepegawaian;
 - c. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jumlah SDM Aparatur BKD untuk penyelenggaraan Diklat pegawai guna memantapkan kinerja aparatur secara menyeluruh;
 - d. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendidikan SDM Aparatur BKD untuk mengatasi masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS;
 - e. Mendayagunakan semakin baiknya sarana dan prasarana BKD SDM Aparatur BKD untuk memfasilitasi kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah.
 2. Isu strategis hasil interaksi pemetaan faktor kelemahan dengan peluang:
 - a. Mengatasi rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi;

- b. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Mengatasi belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD untuk menyeleksi ketersediaan SDM aparatur paling berkualitas, adapun sistem tersebut akan diperbaharui dengan sistem Manajemen ASN,
 - d. Mengatasi belum ter visualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian untuk mengoptimalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga Diklat berkualitas yang menawarkan kerja sama jenis Diklat dan kursus;
 - e. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan pemanfaatan tersedianya secara lengkap peraturan bidang aparatur Pemerintah.
3. Isu strategis hasil interaksi pemetaan faktor kelemahan dengan tantangan :
- a. Menghindari rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas untuk merespons secara positif dalam rangka memfasilitasi kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah;
 - b. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengusahakan perbaikan belum mantapnya kinerja aparatur;
 - c. Menghindari belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK/Sistem Manajemen ASN pada BKD untuk merespons secara positif terhadap tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Menghindari belum ter visualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian dengan mengusahakan perbaikan masih rendahnya kesadaran hukum bagi ASN;
 - e. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur untuk merespon secara positif terhadap berbagai proses kerja birokrasi Pemerintah

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Reviu adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BKD serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja BKD berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja BKD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah BKD.

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran perubahan tahun 2023 yang diusulkan BKD sebesar Rp. 18.484.323.631,- (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan BKD diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.3 berikut:

TABEL 2.3.

REVIEW TERHADAP RANCANAGN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEPEGAWAIAN										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan BKD	100 %	10838307	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan BKD	100 %	10838307	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan AKIP	7 Laporan	147728	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan AKIP	7 Laporan	147728	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10832	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10832	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8290	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8290	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11546	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11546	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8510	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8510	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11758	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11758	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10561	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10561	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	86228	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	86228	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	8912531	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	8912531	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 orang per bulan	8891914	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 orang per bulan	8891914	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	1 Laporan	20617	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	1 Laporan	20617	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kepegawaian BKD	1 Laporan	35000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kepegawaian BKD	1 Laporan	35000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	35000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	35000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Paket	1082971	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Paket	1082971	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	23400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	23400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	204630	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	204630	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	#VALUE!	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	#VALUE!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49892	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49892	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	n 28 Dokume	12805	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	n 28 Dokume	12805	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	23018	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	23018	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	769223	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	769223	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Kegiatan Pengadaan Modal Barang Milik Daerah	1 Paket	226536	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Kegiatan Pengadaan Modal Barang Milik Daerah	1 Paket	226536	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	-	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	226536	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	226536	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa Kantor	3 Jenis	363619	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa Kantor	3 Jenis	363619	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	69683	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	69683	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	293935	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	293935	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah pemeliharaan sarana penunjang kantor	5 Jenis	69919	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah pemeliharaan sarana penunjang kantor	5 Jenis	69919	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	59779	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	59779	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10140	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10140	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Terpenuhinya Formasi Aparatur Sesuai dengan Anjab dan ABK	86 %	4596106	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Terpenuhinya Formasi Aparatur Sesuai dengan Anjab dan ABK	86 %	4596106	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	8 Dokumen	1449675	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	8 Dokumen	1449675	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	1011185	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	1011185	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	159953	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	159953	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	22 Lembaga	-	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	22 Lembaga	-	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	168450	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	168450	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Laporan	110087	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Laporan	110087	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	n 12 Dokume	811983	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	12 Dokume	811983	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	144575	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	144575	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	183209	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	183209	
	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	484198	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	484198	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peningkatan Kapasitas PNS	551 Orang	1848763	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Peningkatan Kapasitas PNS	551 Orang	1848763	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	351 Orang	1737149	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	351 Orang	1737149	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 Orang	35528	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 Orang	35528	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	76085	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	76085	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kinerja	5 Kegiatan	485683	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kinerja	5 Kegiatan	485683	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20768	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20768	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	176098	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	176098	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang	219624	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang	219624	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	45316	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	45316	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	52 Usulan	23874	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	52 Usulan	23874	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3049909					3049909	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	86 %	3049909	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	86 %	3049909	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis	2 Kebijakan	218866	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis	2 Kebijakan	218866	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	218866	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	218866	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	2831043	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	2831043	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	2831043	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	2831043	
TOTAL					18.484.323					18.484.323	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Diklat.

Rencana Kerja dan Pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2023, tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam dokumen Perubahan Renja BKD Tahun 2023, maka sebagai upaya untuk mewujudkan hasil pembangunan bidang kepegawaian yang berkesinambungan, tujuan dan sasaran bidang kepegawaian dalam Perubahan Renja Tahun 2023.

Tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan lima tahun mendatang adalah

Tujuan :

- 1. Meningkatnya Profesionalitas ASN
- 2. Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian

Sasaran :

- 1. Penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit
- 2. Mewujudkan BKD yang berkinerja tinggi dan Akuntabel

Tujuan 1 BKD : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Kinerja Tujuan 1

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88		74,75	77,46	80,26

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
prima bidang kepegawaian								

Tujuan 2 BKD : Indeks Profesionalitas

Target Kinerja Tujuan 2

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Tujuan 2 : Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas	71	74	78		64	51,89	54,86

Nilai dimensi kualifikasi berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan yang diakui BKN, jadi besar kecilnya nilai dipengaruhi oleh banyaknya penerbitan tugas belajar;

Nilai dimensi kompetensi dari pengembangan kompetensi pegawai setiap tahun melalui pelatihan klasikal dan non klasikal, jadi besar kecilnya nilai dipengaruhi oleh banyaknya penyelenggaraan diklat/seminar bersertifikat;

- a. Nilai dimensi kualifikasi berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan yang diakui BKN, jadi besar kecilnya nilai dipengaruhi oleh banyaknya penerbitan tugas belajar;
- b. Nilai dimensi kompetensi dari pengembangan kompetensi pegawai setiap tahun melalui pelatihan klasikal dan non klasikal, jadi besar kecilnya nilai dipengaruhi oleh banyaknya penyelenggaraan diklat/seminar bersertifikat;
- c. Nilai dimensi kinerja didapat dari laporan SKP, jadi besar kecilnya Nilai dipengaruhi oleh banyaknya nilai SKP yang dilaporkan;
- d. Nilai dimensi disiplin didapat dari laporan hukuman disiplin, jadi besar kecilnya Nilai dipengaruhi oleh sedikitnya laporan hukuman disiplin yang dilaporkan.

Berdasarkan Renstra hasil reuiu tersebut, BKD memiliki 2 (dua) indikator sasaran strategis, 1 indikator kinerja utama, dan 3

indikator program dengan pencapaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan BKD yang berkinerja tinggi dan Akuntabel
Indikator 1 : Nilai Implementasi SAKIP BKD

Target Kinerja Sasaran 1

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan BKD yang berkinerja tinggi dan Akuntabel	Nilai Implementasi SAKIP BKD	86	87	88 (A)	89	79,44	81,61	85,75 (A)

Sasaran Strategis 2 : Penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit
Indikator 1 (IKU) : Indeks Merit Manajemen ASN

Target Kinerja Sasaran 1

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Sasaran Strategis 1 : Penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	Indeks Merit Manajemen ASN	0,61	0,66	0,71	0,76	0,48	0,64	0,63

Tabel 2.3.3.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra BKD 2019-2024					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tujuan 1 :		Indeks Kepuasan Masyarakat											
1	Terwujudnya pelayanan prima bidang kepegawaian	-		86	87	88	89	90	77,46	78,86	80,26	89	90	-
	Sasaran Strategis 1 :		Nilai Implementasi SAKIP BKD											
2	Mewujudkan BKD yang berkinerja tinggi dan Akuntabel	-		86	87	88 (A)	89	90	79,44	81,61	85,75 (A)	89	90	-
	Tujuan 2 :		Indeks Profesionalitas											
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN	-		71	74	78	81	84	64	51,89	54,86	81	84	-

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra BKD 2019-2024					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sasaran Strategis 2 :													
4	Penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	-	Indeks Merit Manajemen ASN	0,61	0,66	0,71	0,76	0,81	0,48	0,64	0,63	0,76	0,81	-

3.2. Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2019 - 2024 adalah :

Tabel 3.
Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan
Penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	Indeks Merit Manajemen ASN	Nilai Faktual Self <i>Assesment</i> 8 Aspek Manajemen SDM yang Diatur UU 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 (Perencanaan, Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karier, Promosi dan

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan
		Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi)

Jumlah Program : 3 Program
Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 38 Sub Kegiatan

Tabel 3.1.
Penetapan Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana		Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an				Nasiona l	Daera h			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	0 3				KEPEGAWAIAN							21.799. 528.913	14.819. 705.428	15.434. 413.936				21.305. 762.604				
5	0 3	0 1			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOT A	Persentase pemenuhan penunjang urusan BKD	%		%	100 %	100 %	15.776. 687.233	10.223. 598.728	10.838. 307.236				100 %	13.574. 543.040			
5	0 3	0 1	2, 0 1		Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan AKIP	Lap ora n		La pora n	7 Lapo ran	7 Lapo ran	74.728. 500	74.728. 500	147.728 .500				7 Lapo ran	248.679 .313			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas					
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l		Daera h	Targ et		Pagu Indikatif
5	03	01	2,01	01	Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Doku men	2 Doku men	10.832.000	10.832.000	10.832.000	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparatur	Terpe nuhin ya Lapor an Akunt abilita s Kinerj a	2 Doku men	105.911.507	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusun an Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	8.290.500	8.290.500	8.290.500	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparatur	Terpe nuhin ya Lapor an Akunt abilita s Kinerj a	1 Doku men	9.896.900	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusun an Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	11.546.800	11.546.800	11.546.800	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparatur	Terpe nuhin ya Lapor an Akunt abilita s Kinerj a	1 Doku men	9.896.900	Badan Kepega waian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	8.510.100	8.510.100	8.510.100	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur	Terpe nuhin ya Lapor an Akunt abilita s Kinerj a	1 Doku men	5.652.500	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusun an Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	11.758.400	11.758.400	11.758.400	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur	Terpe nuhin ya Lapor an Akunt abilita s Kinerj a	1 Doku men	11.758.400	Badan Kepega waian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Lapo ran	1 Lapo ran	10.561.800	10.561.800	10.561.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Terpe nuhin ya Lapor an Akunt abilita s Kinerj a	1 Lapo ran	5.114.000	Badan Kepega waian dan Diklat	
5	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Lapo ran	1 Lapo ran	13.228.900	13.228.900	86.228.900	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Terpe nuhin ya Lapor an Akunt abilita s Kinerj a	1 Lapo ran	100.449.106	Badan Kepega waian dan Diklat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.657.169.791	8.910.877.458	8.912.531.966					1 Laporan	10.284.172.778		
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 orang per bulan	76 orang per bulan	9.625.533.391	8.890.260.358	8.891.914.866	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Laporan Keuangan BKD	76 orang per bulan	10.225.533.391	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	anaporanaporan			1 Laporan	1 Laporan	31.636.400	20.617.100	20.617.100	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Laporan Keuangan BKD	1 Laporan	58.639.387	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian BKD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	179.437.500	35.000.000	35.000.000					1 Laporan	123.000.000		
5	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	106.437.500	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kepegawaian BKD	5 Orang	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	73.000.000	35.000.000	35.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kepegawaian BKD	5 Orang	73.000.000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	11 Paket	11 Paket	1.749.843.990	542.917.100	1.082.971.100					11 Paket	1.346.260.147		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 pake t	12 pake t	23.400.000	23.400.000	23.400.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur	Penun jang Urusa n BKD	12 pake t	10.758.485	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 pake t	1 pake t	272.046.582	204.630.900	204.630.900	Kab. Garut, Tarogong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur	Penun jang Urusa n BKD	1 pake t	295.098.429	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 pake t	1 pake t	277.250.800	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul , Suka galih	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat	Penun jang Urusa n BKD	1 pake t	211.710.896	Badan Kepega waian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
															an Publik	ur						
5	03	01	2,06	05	Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Pake t	1 Pake t	49.892.850	49.892.700	49.892.700	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a apar atur	Penun jang Urusa n BKD	1 Pake t	93.877.716	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	01	2,06	06	Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				28 Doku me	n 28 Doku me	n 12,823,000	12.805.200	12.805.200	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a apar atur 7. Pening	Penun jang Urusa n BKD	28 Doku me	n 12,830,832	Badan Kepega waian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif			
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h	
5	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Lapo ran	1 Lapo ran	23.060.000	23.018.600	23.018.600	Kab. Garu t, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur	Penun jang Urusa n BKD	1 Lapo ran	23.086.800	Badan Kepega waian dan Diklat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	01	2,06	09	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lapo ran	1 Lapo ran	1.091.37 0.758	229.169. 700	769.223. 700	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparatur	Penun jang Urusa n BKD	1 Lapo ran	698.896. 989	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	01	2,07		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Pengadaan Modal Barang Milik Daerah	Pak et		Pa ket	1 Pake t	1 Pake t	3.169.5 99.700	226.536 .641	226.536 .641						1 Pake t	245.807 .103	
5	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 pake t	1 pake t	1.506.22 7.100	0	0	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a	Baran g Milik Daera h	1 pake t	0	Badan Kepega waian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
																aparatur						
5	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	1.663.372.600	226.536.641	226.536.641	Kab. Garut, Tarogong Kidul , Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Barang Milik Daerah	7 Unit	245.807.103	Badan Kepegawaian dan Diklat	
5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa Kantor	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	326.947.852	363.619.829	363.619.829					3 Jenis	302.289.532		
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				1 Laporan	1 Laporan	69.683.893	69.683.893	69.683.893	Kab. Garut, Tarogong Kidul , Suka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja	Jasa Penunjang	1 Laporan	66.567.136	Badan Kepegawaian dan Diklat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana		Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an				Nasiona l	Daera h					
						Disediakan							galih			a aparat ur								
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lapo ran	2 Lapo ran	257.263. 959	293.935. 936	293.935. 936	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur	Jasa Penun jang	2 Lapo ran	235.722. 396	Badan Kepega waian dan Diklat		
5	03	01	2,09		Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerintan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana penunjang kantor	Jeni s		Je nis	5 Jenis	5 Jenis	618.959 .900	69.919. 200	69.919. 200								5 Jenis	1.024.3 34.167	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas					
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l		Daera h			
5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	59.779.200	59.779.200	59.779.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Barang Milik Daerah	18 Unit	44.397.659	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	10.140.000	10.140.000	10.140.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Barang Milik Daerah	14 Unit	100.000.000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.080.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Barang Milik Daerah	1 Unit	219.980.354	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
																aparatur						
5	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.352.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul , Sukagalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Barang Milik Daerah	1 Unit	219.987.900	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.608.700	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul , Sukagalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Barang Milik Daerah	1 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	02			PROGRA M KEPEGAW AIAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Formasi Aparatur Sesuai dengan Anjab dan ABK	%		%	86 %	86 %	6.022.8 41.680	4.596.1 06.700	4.596.1 06.700				86 %	7.731.2 19.564			
5	03	02	2, 01		Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawa ian ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan, Pemberhentia n dan Informasi Kepegawaian ASN	Doku men	en	Do kume n	8 Doku men	8 Doku men	1.638.8 57.700	1.449.6 75.700	1.449.6 75.700				8 Doku men	2.660.4 39.365			
5	03	02	2, 01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Doku men	3 Doku men	1.011.18 6.000	1.011.18 5.200	1.011.18 5.200	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur		3 Doku men	1.665.18 2.783	Badan Kepega waian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	176.553.700	159.953.300	159.953.300	Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		1 Dokumen	197.033.662	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	02	2,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				22 Lembaga	22 Lembaga	29.118.000	0	0	Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		22 Lembaga	85.000.000	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	168.450.000	168.450.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		1 Dokumen	350.000.000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Laporan	2 Laporan	242.000.000	110.087.200	110.087.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		2 Laporan	363.222.920	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Dokum	en	Do kumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,394,790,380	811.983.850	811.983.850					12 Dokumen	1,792,143,600		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Doku men	2 Doku men	492.435.600	144.575.800	144.575.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		2 Doku men	492.435.600	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Doku men	1 Doku men	418.156.500	183.209.950	183.209.950	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Doku men	564.434.400	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	484.198.280	484.198.100	484.198.100	Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		5 Dokumen	735.273.600	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Peningkatan Kapasitas PNS	Orang		Orang	551 Orang	551 Orang	2.332.250.800	1.848.763.950	1.848.763.950					551 Orang	2.545.840.407		
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				351 Orang	351 Orang	2.085.153.400	1.737.149.750	1.737.149.750	Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		351 Orang	2.344.630.827	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				200 Oran g	200 Oran g	116.348.700	35.528.700	35.528.700	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		200 Oran g	104.400.010	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	02	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Doku men	1 Doku men	130.748.700	76.085.500	76.085.500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		1 Doku men	0	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kinerja	Kegi ata	n	Ke giata n	5 Kegi atan	5 Kegi atan	656.942.800	485.683.200	485.683.200					5 Kegi atan	732.796.192		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	02	2,04	01	Penyusun an Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Doku men	1 Doku men	20.768.600	20.768.600	20.768.600	Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur		1 Doku men	28.954.688	Badan Kepega waian dan Diklat
5	03	02	2,04	02	Pelaksana an Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Doku men	1 Doku men	188.505.800	176.098.700	176.098.700		Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur 7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur		1 Doku men	113.718.528	Badan Kepega waian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				9 Orang	9 Orang	378.476.900	219.624.400	219.624.400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		9 Orang	231.308.000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				6 Laporan	6 Laporan	45.316.900	45.316.900	45.316.900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur		6 Laporan	148.448.976	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	02	2,04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				52 Usulan	52 Usulan	23.874.600	23.874.600	23.874.600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat		52 Usulan	34.606.000	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
																an Publik	ur					
5	0 4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							9.437.4 19.843	3.049.9 09.695	3.049.9 09.695				25.046. 306.160				
5	0 4	0 2			PROGRA M PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Terpenuhinya Pengembang an Kompetensi	%		%	86 %	86 %	9.437.4 19.843	3.049.9 09.695	3.049.9 09.695				86 %	25.046. 306.160			
5	0 4	0 2	2, 0 1		Pengemba ngan Kompeten si Teknis	Jumlah Kebijakan Pengembang an Kompetensi Teknis	Kebi jak	an	Ke bijak an	2 Kebij akan	2 Kebij akan	336.996 .000	218.866 .500	218.866 .500				2 Kebij akan	693.329 .976			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	0	0	2,	0	1	Penyusun an Kebijakan Teknis dan Rencana Pengemba ngan Kompeten si Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administ rasi Penyeleng gara Urusan Pemerinta han Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang , dan Urusan Pemerinta han Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengemban g Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun							Kab. Garut, Taro gong Kidul , Suka galih	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerj a aparat ur		2 Doku men	693.329. 976	Badan Kepega waian dan Diklat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get Akh ir Peri ode RPJ MD	Real isasi Capa ian RKP D Tah un 202 1	Praki raan Capa ian Targ et RKP D Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif		
										Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasiona l					Daera h
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi Lelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Lap ora n		La pora n	1 Lapo ran	1 Lapo ran	9.100.423.843	2.831.043.195	2.831.043.195				1 Lapo ran	24.352.976.184			
5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Lapo ran	3 Lapo ran	9.100.423.843	2.831.043.195	2.831.043.195		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	3 Lapo ran	24.352.976.184	Badan Kepegawaian dan Diklat		
TOTAL												31.236.948.756	17.869.615.123	18.484.323.631				46.352.068.764				

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) tahun 2023 disusun dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran dan hasil pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Garut tahun 2023, serta dalam penyusunan anggaran biaya yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas riil keuangan daerah.

Rencana Kerja BKD ini akan menjadi tolok ukur dan dipahami oleh seluruh staf dan jajaran, sehingga akan memiliki kesamaan pandang dalam mencapai tujuan. Dengan harapan realisasi capaian kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana dengan baik.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.

Dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis BKD Kabupaten Garut tahun 2019-2024. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Renja BKD tahun 2023 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dalam rangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu Peningkatan SDM Aparatur perencanaan dan bidang lainnya, untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan dan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Dalam Menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN